

PERAN PEMERINTAH MENJAWAB TANTANGAN BIDANG PETERNAKAN DALAM PEMENUHAN PROTEIN HEWANI

Sri Yuniati Putri Koes Hardini
(yuniati@ecampus.ut.ac.id)

PENGANTAR

Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut menandatangani Deklarasi Milenium yang dilaksanakan pada tahun 2000. Komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk target yang sering disebut Millenium Development Goals (MDGs). Menurut Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia yang diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) tahun 2011, banyak peningkatan yang sudah dicapai, walaupun belum semua indikator dapat mencapai apa yang sudah ditargetkan. Hal ini disebabkan keterlambatan implementasi MDGs dari saat penandatanganan pada tahun 2000, sementara Indonesia baru mengimplementasikan pada tahun 2010 karena Indonesia harus memulihkan diri akibat krisis ekonomi tahun 1998.

Panuluh & Fitri (2016) melaporkan bahwa agenda pembangunan global MDGs ini sudah berakhir pada tahun 2015, sebagai gantinya 193 negara pendukung MDGs termasuk Indonesia menyepakati pembangunan universal baru yang tertuang dalam dokumen yang berjudul *Transforming Our World the 2030 Agenda for Sustainable Development* yang berisi 17 tujuan dan 169 sasaran dan mulai berlaku tahun 2016 hingga 2030. Dokumen ini terkenal dengan nama *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau sering disebut dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Terdapat lima prinsip dasar dalam SDGs sebagai penyeimbang antara dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan yaitu (1) manusia (*people*), (2) bumi (*planet*), (3) kemakmuran (*prosperity*), (4) perdamaian (*peace*), dan kerjasama (*partnership*). Kelima prinsip dasar ini sering disebut dengan

istilah 5 P. Lima prinsip tersebut merupakan payung untuk menaungi tujuan dan sasaran SDGs yang terintegrasi dan tidak terpisah-pisah guna mencapai kehidupan manusia di bumi dengan lebih baik (Panuluh & Fitri, 2016). Jumlah Sasaran dan indikator dari masing-masing Tujuan pada SDGs dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Sasaran dan Indikator dalam Setiap Tujuan SDGs

No	TUJUAN	Jumlah	
		Sasaran	Indikator
1	<i>No poverty</i> (Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun).	7	12
2	<i>Zero hunger</i> (Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan).	8	14
3	<i>Good health and well-being</i> (Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia).	13	27
4	<i>Quality Education</i> (Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua).	10	11
5	<i>Gender equality</i> (Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan),	9	14
6	<i>Clean water</i> (Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua).	8	11
7	<i>Affordable and clean energy</i> (Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua).	5	6
8	<i>Decent work and economic growth</i> (Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang	12	17

No	TUJUAN	Jumlah	
		Sasaran	Indikator
	inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua).		
9	<i>Industry, innovation and infrastructure</i> (Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi).	8	12
10	<i>Reduced inequalities</i> (Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara).	10	11
11	<i>Sustainable cities and communities</i> (Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan).	10	15
12	<i>Responsible consumption and production</i> (Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan).	11	13
13	<i>Climate action</i> (Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya).	5	7
14	<i>Life below water</i> (Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan).	10	10
15	<i>Life on land</i> (Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati).	12	14
16	<i>Peace, Justice and strong institutions</i> (Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua,	12	23

No	TUJUAN	Jumlah	
		Sasaran	Indikator
	dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan).		
17	<i>Partnership for the goals</i> (Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan).	19	25

Sumber: Panuluh & Fitri (2016) dan Perpres RI Nomor 59 tahun 2017.

Pada Tabel 1 terlihat bahwa dari sejak Indonesia ikut serta dalam pelaksanaan MDGs sampai SDGs, tujuan dan asaran yang akan dicapai di bidang Peternakan tidak dinyatakan dengan jelas, namun bergabung dengan Tujuan nomor 1 (memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrem) dan 7 (memastikan kelestarian lingkungan) pada MDGs serta Tujuan nomor 2 (*Zero hunger*) dan 15 (*Life on land*) dalam SDGs Lalu tujuan tersebut diturunkan lagi dalam rencana pembangunan bidang pertanian yang berkaitan erat dengan nilai gizi terutama protein hewani yang disediakan oleh bidang peternakan.

Untuk menindaklanjuti pelaksanaan SDGs di Indonesia, pada tahun 2017 terbit Peraturan Presiden RI Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk ikut serta menyukseskan tercapainya SDGs di Indonesia. Dalam Lampiran Peraturan Presiden RI Nomor 59 tahun 2017 bidang peternakan dapat dilihat pada beberapa tujuan Global. Tujuan Global I adalah mengakhiri segala bentuk kemiskinan di wilayah mana pun; Tujuan Global II adalah menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Tujuan Global XV adalah melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Tujuan Global I, II dan XV ini diturunkan menjadi tiga Sasaran Global dan diuraikan dalam Sasaran

Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Ketercapaian sasaran nasional RPJMN di bidang peternakan tersebut bergantung pada pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian dan Direktorat Jenderal yang ada di bawah naungannya, dalam merencanakan dan melaksanakan program-programnya. Pertanyaannya adalah sampai sejauh mana pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Pertanian dan lebih khusus adalah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) dapat menjawab tantangan bidang peternakan dalam memenuhi kebutuhan protein hewani di era millennium sesuai dengan target yang sudah ditetapkan dalam RPJMN.

Berdasarkan paparan tersebut, penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis tantangan di bidang peternakan dalam pemenuhan gizi masyarakat sesuai dengan RPJMN. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di setiap wilayah di Indonesia, meningkat pula kebutuhan akan protein baik nabati maupun hewani. Bidang peternakan merupakan salah satu sumber yang menjadi penyuplai kebutuhan protein hewani bagi penduduk.

PEMBAHASAN

Sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Ditjen PKH Tahun 2016, **tujuan** Ditjen PKH tahun 2015-2019 adalah:

1. Meningkatkan populasi, produksi dan produktivitas ternak
2. Meningkatkan kualitas komoditas ternak
3. Meningkatkan produk ternak yang *Aman, Sehat, Utuh dan Halal* (ASUH) dan berorientasi ekspor
4. Meningkatkan status kesehatan hewan.
5. Mengembangkan usaha peternakan yang terintegrasi
6. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak.

Sasaran yang ingin dicapai meliputi:

1. Meningkatnya produksi pangan asal ternak
2. Meningkatnya daya saing peternakan
3. Meningkatnya kesejahteraan peternak.

Tujuan dan Sasaran yang terdapat di RKT Ditjen PKH tentunya merupakan turunan dari apa yang sudah dirumuskan dalam RPJMN 2015 – 2019. Bila dilihat sasaran nasional RPJMN 2015 – 2019, bidang peternakan terlibat langsung dalam usaha peningkatan gizi masyarakat yang tertuang dalam Tujuan Global nomor I dan II pada Sasaran Nasional RPJMN 2015-2019 nomor 1.1 (Tabel 2). Keterlibatan bidang peternakan tersebut, yaitu turut serta menurunkan prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita pada tahun 2019 menjadi 17%. Ketersediaan protein hewani berhubungan dengan peningkatan gizi masyarakat. Selain itu bidang peternakan secara tidak langsung juga berperan dalam mengentaskan kemiskinan yang tertuang dalam Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Tabel 2. Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk Bidang Peternakan

Tujuan Global	Sasaran Global	Sasaran Nasional RPJMN 2015-2019
Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan	1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	<p>1.1. <i>menurunkan prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita pada tahun 2019 menjadi 17% (2013: 19,6%)</i></p> <p>1.2. <i>menurunnya proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari pada tahun 2019 menjadi 17% (2016:17,4%)</i></p>
	2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada	2.1. <i>menurunnya prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta pada tahun 2019 menjadi 28% (2013: 32,9%).</i>

Tujuan Global	Sasaran Global	Sasaran Nasional RPJMN 2015-2019
	tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2 <i>Menurunnya prevalensi wasting (kurus) pada anak balita pada tahun 2019 menjadi 9,5% (2013: 12%).</i>
		2.3 <i>Menurunnya prevalensi anemia pada ibu hamil pada tahun 2019 menjadi 28% (2013: 37,1%).</i>
		2.4 <i>Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif menjadi 50% pada tahun (2013: 38%).</i>
		2.5 <i>Meningkatnya kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai 92,5 (2014: 81,8), dan tingkat konsumsi ikan menjadi 54,5 kg/kapita/tahun pada tahun 2019 (2015: 40,9 kg/kapita/tahun).</i>

Sumber: Lampiran Perpres RI No 59 Tahun 2017

Banyak cara yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai target yang sudah ditentukan, misalnya yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian melalui Ditjen PKH memberi bantuan ternak untuk keluarga miskin (Anam, 2018). Penerima manfaat bantuan ternak dipilih masyarakat miskin yang sudah mengusahakan ternak. Bantuan dapat berupa pemberian sapi indukan lokal, kambing, unggas lokal unggul, dan lain-lainnya; kemudian diberikan bantuan tambahan berupa kegiatan pengendalian penyakit rabies, penanaman hijauan makanan ternak, dan kendaraan operasional pusat kesehatan hewan (Puskesmas) keliling. Contoh bantuan ini sudah dilakukan di 10 desa di daerah Kabupaten Gianyar. Namun sepertinya usaha pemerintah untuk mencapai target tersebut masih berat untuk dapat dicapai, hal ini terkait erat dengan capaian target dari Ditjen PKH yang belum sesuai.

Dalam Laporan Tahunan Ditjen PKH tahun 2016, terdapat beberapa perkembangan yang perlu dicatat pencapaian targetnya yang meliputi capaian target untuk ternak besar, sedang, kecil, dan aneka ternak. Meskipun pertumbuhan ternak besar, sedang, kecil, dan aneka ternak mengalami kenaikan pada tahun 2016, namun kenaikan ini juga diikuti dengan kenaikan jumlah penduduk yang meningkatkan keperluan gizi dari protein hewani. Karena hal ini, hasil peningkatan ekspor di beberapa bidang peternakan menjadi kurang berarti karena terlibas oleh tingginya impor bidang peternakan. Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan atau *Livestock and Animal Health Statistic* (Ditjen PKH, 2017) menjelaskan sebagai berikut.

1. Nilai Ekspor

Peningkatan sebesar 22,52 persen untuk nilai ekspor produk peternakan terjadi pada tahun 2016; peningkatan ini berasal dari ekspor lain-lain. Masih terdapat jenis ekspor lainnya yang juga meningkat pada tahun 2016 yaitu ekspor hasil ternak sebesar 6,36 persen dari tahun 2015.

Dilihat dari sisi volume, pada tahun 2016 ekspor peternakan juga mengalami peningkatan sebesar 7,86 persen dari volume ekspor tahun 2015. Peningkatan tersebut di antaranya disebabkan oleh meningkatnya volume ekspor hasil ternak.

2. Nilai Impor

Pada tahun 2016 peningkatan juga terjadi pada nilai impor produk peternakan sebesar 8,75 persen dibandingkan impor tahun 2015. Peningkatan tersebut di antaranya disebabkan oleh meningkatnya nilai impor hasil ternak sebesar 17,05 persen.

Dari sisi volume, terjadi juga peningkatan impor peternakan pada tahun 2016 sebesar 19,23 persen dibanding volume impor tahun 2015. Salah satu penyebab peningkatan tersebut adalah meningkatnya volume impor hasil ternak sebesar 31,67 persen dari 0,4 juta ton pada tahun 2015 menjadi 0,6 juta ton pada tahun 2016.

Dari keterangan tersebut terlihat bahwa neraca ekspor–impor peternakan pada tahun 2015-2016 masih mengalami defisit (volume impor lebih besar dari pada volume ekspor). Defisit neraca ekspor–impor peternakan dalam kurun waktu 2015-2016 mengalami peningkatan sebesar 21,09 persen dari defisit pada tahun 2015. Jika pada tahun 2015 rasio volume ekspor terhadap volume impor senilai 1:7,1 maka pada tahun 2016 rasionya meningkat menjadi 1:7,9.

Defisit neraca ekspor-impor ini terjadi dari tahun ke tahun seperti yang ditunjukkan pada Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH, 2015), yang dalam kurun waktu 2013-2014 mengalami peningkatan sebesar 24,88 persen. Namun, terjadi sedikit penurunan defisit pada tahun 2016 yaitu sebesar 5,5 persen, dari defisit sebesar 1,26 juta ton pada tahun 2014 menjadi defisit sebesar 1,19 juta ton pada tahun 2015. Data ini dijelaskan dalam Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH, 2016).

Pemerintah sudah berusaha untuk membuat program yang ditujukan untuk peningkatan peternakan dan kesejahteraan peternak, sehingga terjadi peningkatan jumlah populasi ternak dan produksi daging, telur dan susu di setiap tahun. Namun, karena konsumsi protein yang meliputi daging, telur dan susu per tahun juga meningkat, berakibat pada meningkatnya impor peternakan.

Salah satu program kegiatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi tantangan pemenuhan gizi masyarakat dan peningkatan pembangunan peternakan di Indonesia adalah diterbitkannya Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2016 tentang Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting. Dalam pelaksanaan di lapangan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian telah membentuk Sekretariat Kelompok Kerja Upus Siwab dan Tim Supervisi Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting. Program ini berguna untuk meningkatkan potensi induk dalam menghasilkan pedet, dengan membantu mengurangi gangguan reproduksi,

mengatur panjang *calving interval*, membantu memperbaiki manajemen pemeliharaan dan pemberian pakan, penyediaan semen beku, pengendalian penyakit, dan mengendalikan pematangan betina produktif.

Banyak usaha atau program-program yang disediakan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas ternak, baik itu ternak besar, sedang, kecil, dan aneka ternak. Namun masih banyak kendala yang dihadapi pemerintah dalam meningkatkan peternakan di Indonesia. Sejumlah kendala yang masih ada, antara lain berikut ini.

1. Pembibitan dan produksi ternak

- Ketersediaan bibit ternak yang masih belum mencukupi, karena untuk pemeliharaan indukan diperlukan biaya yang mahal dan waktu yang panjang. Manajemen pemeliharaan juga perlu diperbaiki dengan menggunakan sistem pencatatan (*recording system*) yang baik.

Sebenarnya Indonesia memiliki bibit unggul sapi yaitu sapi Bali, dan juga kerbau yang memiliki daya tahan paling sesuai dengan iklim tropis. Namun, ternyata kondisi peternakan sapi dan kerbau belum memungkinkan untuk hanya dijadikan peternakan pembibitan (*breeding farm*) yang dilakukan oleh perorangan, atau perusahaan swasta. Hal ini disebabkan peternakan pembibitan sapi apalagi kerbau memerlukan investasi sangat besar dan memerlukan waktu yang lama untuk memperoleh keturunan yang dibutuhkan oleh pasar. Secara manajerial, peternak masih terkendala dengan teknologi pencatatan yang diperlukan dalam pengelolaan *breeding farm*. Pencatatan ini menjadi sangat penting karena dengan pencatatan dapat dilihat sapi-sapi yang memiliki produktivitas tinggi dan sifat ini diturunkan secara tetap dan konsisten.

- Permasalahan penting tentang kebijakan perunggasan yang menyangkut bibit ayam muncul dari Permentan nomor

61/Permentan/PK.230/12/2016. Peraturan ini membatasi pertumbuhan pelaku usaha ternak mandiri dan koperasi, karena adanya persyaratan yang harus dipenuhi pelaku usaha, serta adanya pengaturan harga daging dan telur ayam yang sering kali tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Keadaan ini dirasakan sangat merugikan peternak kecil.

2. Pakan

Ketersediaan pakan yang mencukupi baik kualitas maupun kuantitas perlu ditingkatkan. Penggunaan bahan pakan lokal yang tidak bergantung pada bahan pakan impor juga perlu ditingkatkan, sehingga tidak bergejolak pada saat nilai dolar naik. Sebagai contoh adalah penggunaan jagung dan *feed supplement* lainnya. Ketersediaan hijauan yang cukup untuk daerah tertentu sudah semakin sulit, karena lahan digunakan untuk keperluan hidup manusia. Sudah ada usaha peternak untuk memanfaatkan bekicot sebagai sumber protein pada pakan ternak. Namun, untuk peternak skala besar kontinuitas ketersediaan untuk tepung bekicot ini masih jadi kendala. Bila ketersediaan tepung bekicot sebagai sumber protein dapat disediakan cukup dan berkelanjutan, hal ini akan dapat menekan biaya produksi karena dapat menekan biaya yang berasal dari bahan pakan impor.

3. Kesehatan hewan

- Perlu optimalisasi pemanfaatan Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas) yang jumlahnya masih belum memadai.
- Kebijakan baru pemerintah mengenai pelarangan penggunaan AGP (*antibiotic growth promoter*).
- Adanya fenomena klinis baru dari virus AI H9N2.

4. Kesehatan masyarakat veteriner

Peningkatan fungsi dan persyaratan teknik untuk rumah potong hewan (RPH).

5. Pengolahan dan pemasaran hasil peternakan

- Perlu didukung aturan dan kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan ketersediaan DOC (*day old chicks*) yang sering kali merugikan peternak kecil dan lebih menguntungkan ke peternak besar.
- Terjadinya impor daging kerbau dari India untuk menekan harga daging dalam negeri, namun merugikan peternak kecil.

6. Kebijakan Pemerintah

Adanya kebijakan yang dirasa kontroversial terhadap pembangunan peternakan di Indonesia antara lain (Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat, 2018):

- Permendag No 27/M.DAG/PER/5/2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen. Aturan harga ini menimbulkan gejolak baik dalam masyarakat maupun petani peternak.
- PP4/2016 dan SK Mentan No 2556/2016 yang memberikan peluang impor daging sapi dari negara yang belum bebas penyakit mulut dan kuku (PMK) yaitu India.
- Permentan No 02/2017 yang salah satunya menyatakan rasio impor sapi bakalan dengan indukan adalah 1:5.

Kebijakan pemerintah seharusnya menguntungkan tidak saja peternak kecil namun juga masyarakat sebagai konsumen. Namun kenyataannya kebijakan pemerintah ini sering kali tidak sesuai dengan peternak kecil. Sebagai contoh: kebijakan tentang pembatasan bibit ayam yang membebani peternak kecil dengan skala tertentu yang harus memiliki kandang tertutup menggunakan AC dan fan. Persyaratan ini tentu akan mengubah struktur kandang dan meningkatkan modal, sementara keuntungan masih belum

bisa diprediksi meningkat. Selain itu, adanya kebijakan impor daging yang berasal dari India, dimana negara ini diketahui masih belum bebas dari penyakit mulut dan kuku. Kebijakan ini menuai kontroversi karena tidak sesuai dengan aturan pencegahan penyakit yang dicanangkan pemerintah Indonesia yang sudah bebas dari penyakit mulut dan kuku.

Sejumlah kebijakan yang kurang bersahabat dengan kesejahteraan peternak ini akan menghambat tercapainya pembangunan peternakan yang bertujuan untuk meningkatkan produksi (ketersediaan) ternak, usaha yang berkelanjutan (sumberdaya), dan tercapainya kesejahteraan peternak.

Apabila dilihat dari Tujuan Global nomor XVII dalam SDGs, bidang peternakan memiliki target yang harus dicapai seperti tergambar pada Sasaran Nasional RPJM Nasional 2015-2019 pada butir 4.1 yaitu: Meningkatnya 10% populasi 25 jenis satwa terancam punah pada tahun 2019 (2015: 2%), dan butir 7.1 yaitu: Meningkatnya pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, daya saing nasional dan kesejahteraan masyarakat hingga tahun 2019. Terdapat banyak satwa yang terancam punah yang merupakan sumber daya hayati milik Indonesia. Beberapa satwa tersebut diantaranya adalah *Gallus-gallus Red jungle fowl* dan *Gallus-varius Green jungle fowl* yang merupakan dua spesies ayam asli Indonesia dan digunakan sebagai cikal bakal ayam ras yang sekarang ada, baik untuk ayam petelur maupun ayam pedaging. Berdasarkan laporan dari IUCN (*International Union for Conservation Nature*) tahun 2018, status *Red jungle fowl* dalam posisi *least concern*, yang angkanya terlihat meningkat dari tahun ke tahun sehingga apabila tidak diadakan usaha pelestariannya akan dapat segera menuju kepunahan. Hal ini seperti diyakini oleh Gautier (2018) dalam Animal Diversity Web (ADW) bahwa *Gallus-gallus* telah menghilang dari Asia Tenggara dan Filipina bagian selatan.

Selain *Red jungle fowl*, Sapi Bali merupakan hewan ternak murni yang dimiliki oleh Indonesia sebagai salah satu hewan yang dapat digunakan

sebagai cikal bakal bibit sapi pedaging yang sesuai untuk daerah tropis. Salah satu usaha pemerintah dalam hal ini Ditjen PKH adalah membuka daerah tertentu sebagai sentra pengembangan dan pemurnian bibit unggul asli Indonesia. Daerah Nusa Penida sebagai salah satu sentral pengembangan Sapi Bali, juga di daerah lain di luar pulau Bali misalnya di Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Barru, dan Kabupaten Barito Koala (Arifin, 2015).

Hasil yang sudah diperoleh dengan dilakukannya berbagai program pemerintah memang belum signifikan dalam memenuhi kebutuhan daging masyarakat. Pengembangan pemurnian ternak besar memerlukan waktu yang sangat lama, juga diperlukannya pencatatan dan manajemen yang baik. Berbagai aspek menentukan tercapainya program-program pemenuhan kebutuhan gizi dan protein masyarakat. Aspek kebijakan, pelaku usaha dan peternak, sarana-prasarana atau infrastruktur, dan lain-lain saling terkait dan terintegrasi menentukan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan/SDGs.

PENUTUP

Peran pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian yang dilaksanakan oleh Ditjen PKH untuk menjawab tantangan dalam memenuhi kebutuhan protein hewani masih banyak yang belum dapat dicapai sesuai target yang sudah ditetapkan dalam RPJMN, meskipun ada beberapa bidang yang sudah mencapai target dalam meningkatkan populasi dan produksi hasil ternak. Usaha yang perlu dilakukan pemerintah dalam hal ini Ditjen PKH adalah (a) dengan mengedukasi masyarakat peternak untuk meningkatkan penggunaan produk lokal sebagai pengganti bahan impor dan (b) mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada peternak kecil, sehingga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan peternak.

Pencapaian target RPJMN masih banyak dipengaruhi oleh (a) meningkatnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun, meningkatkan pula kebutuhan akan protein hewani, yang memicu peningkatan impor produk di bidang

peternakan; (b) alih fungsi tanah menjadi tanah hunian yang mendesak bidang pertanian dan peternakan; (c) kebijakan tentang peternakan yang terasa memberatkan peternak kecil; (d) perlu waktu yang lama untuk mengembangkan ternak besar yang produktif, meskipun bibit lokal tersedia; (e) perlu perhatian lebih untuk pelestarian satwa langka yang merupakan cikal bakal bibit saat ini.

REFERENSI

Anam, C. (2018). *Kementan Dorong Pengentasan Kemiskinan Lewat Usaha Peternakan*. Diakses melalui <http://industri.bisnis.com/read/20180131/99/732710/kementan-dorong-pengentasan-kemiskinan-lewat-usaha-peternakan>. 31 Januari 2018 pada 4 Juli 2018.

Arifin, C. (2015). *Daerah-ini-ditetapkan-sebagai-wilayah-bibit-sapi-berkualitas*. Diakses melalui <http://www.tribunnews.com/bisnis/2017/01/11/15-> pada 4 Juli 2018.

BAPPENAS. 2011. *Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2011*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat. (2018). *Outlook Bisnis Peternakan 2018. Menyambut Tahun Politik dan Tahun Bebas AGP*. Diakses melalui <http://dkpp.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2018/01/Outlook-Bisnis-Peternakan-2018.pdf> pada 25 Mei 2018.

Ditjen PKH. 2017. *Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan. Livestock and Animal Health Statistics 2017*. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kementerian Pertanian. Diakses pada <http://ditjenpkh.pertanian.go.id>.

Ditjen PKH. 2016. *Laporan Tahunan Ditjen PKH 2016*. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Diakses pada http://ditjenpkh.pertanian.go.id/userfiles/File/Laporan_Tahunan_Ditjen_PKH_2016.pdf?time=1505709139323 Diunduh 4 Juli 2018.

- Ditjen PKH. 2016. *Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan. Livestock and Animal Health Statistics 2016*. . Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kementerian Pertanian. Diakses pada <http://ditjenpkh.pertanian.go.id>.
- Ditjen PKH. 2015. *Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2016*. Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- Ditjen PKH. 2015. *Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan. Livestock and Animal Health Statistics 2015*. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kementerian Pertanian. Diakses pada <http://ditjenpkh.pertanian.go.id>.
- Gautier, Z. (2018). *Gallus gallus Red jungle fowl*. Animal Diversity Web ADW. Diakses melalui https://animaldiversity.org/site/accounts/information/Gallus_gallus.html pada 4 Juli 2018.
- Panuluh, S. & Fitri, M.R. (2016). *Briefing Paper 02. Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. September 2015 – September 2016*. Diakses melalui https://www.sdg2030indonesia.org/an-component/media/upload-book/Briefing_paper_No_1_SDGS_-2016-Meila_Sekar.pdf pada 4 Juli 2018.
- Peraturan Presiden RI Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- The IUCN. (2018). *Red List of Threatened Species 2018-1*. Diakses melalui <http://www.iucnredlist.org/search?page=854> pada 4 Agustus 2018.
- UNDP. 2015. *Sustainable Development Goals*. Diakses melalui <http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/> pada 4 Juli 2018.